BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan dan kesenjangan sosial merupakan dua isu besar yang saling berkaitan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu tantangan lingkungan yang krusial, yakni permasalahan sampah yang menjadi isu global dan laten bagi keberlanjutan lingkungan. Tiap tahunnya jumlah sampah melonjak seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang berlebihan. Berdasarkan laporan World Bank yang berjudul What a Waste 2.0, pada tahun 2016 dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah. Di seluruh dunia sampah yang dihasilkan per orang per hari berkisar antara 0,11 hingga 4,54 kilogram. Sampah ini pun tidak terkelola dengan aman sekitar 33% melalui pembuangan atau pembakaran terbuka. World Bank juga memproyeksikan peningkatan sampah global sebesar 70% pada 2050.[1] Tanpa adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai turut memperparah lingkaran masalah lingkungan dan sosial yang kompleks.

Sejumlah besar negara, terkhusus negara berkembang mengalami krisis pengelolaan sampah akibat belum memiliki sistem pengelolaan sampah efektif dan

[1] Silpa Kaza, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata, dan Frank Van Woerden, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, overview booklet (Washington: World Bank, 2018).

efisien. Hal ini didukung oleh keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang buruk.[2] Biaya operasional dalam pengelolaan sampah di negara berkembang mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta pembuangan sampah hanya dialokasikan sekitar 35 dolar per tahun, berbanding jauh dengan negara maju yang mengalokasikan biaya pengelolaan sampah sekitar 100 dolar per tahun. Masalah infrastruktur berupa fasilitas pengelolaan sampah yang belum baik juga berpengaruh pada penanganan sampah yang tidak optimal. Kesenjangan pada masalah ini tentunya terus memperdalam krisis lingkungan dan kemanusiaan.

Pengelolaan sampah di Indonesia pun memiliki ketidakefektifan sistem dilihat dari kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menggunung atau *overload*. Di Indonesia, produksi sampah mencapai angka yang sangat tinggi berbanding terbalik dengan angka pengelolaannya. Menurut laporan yang berjudul The Atlas of Sustainable Development Goals 2023, Indonesia pada tahun 2020 berada pada urutan ke-5 sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 68,5 juta ton dan sampah yang masuk ke TPA sebanyak 69%, sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang hanya sekitar 7%.[3] Pengelolaan sampah yang ideal semestinya mencakup pengurangan timbulan sampah, pemilihan, pengolahan, hingga pemanfaat kembali melalui proses daur ulang. Namun,

---

[2] Mita Defitri, "*Permasalahan Sampah Global: Tantangan dan Solusinya*" Waste4change, diakses 1 Februari, https://waste4change.com/blog/permasalahan-sampah-global-tantangan-dan-solusinya/

[3] Universitas Airlangga, "*Telaah Kondisi Terkini TPA di Indonesia: Solusi atau Ancaman?*" Universitas Airlangga Official Website, diakses 1 Februari, https://unair.ac.id/telaah-kondisi-terkini-tpa-di-indonesia-solusi-atau-ancaman/

realita di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dan kapasitas pengelolaan sampah di Indonesia masih terbatas.

Salah satu jenis sampah yang paling mendominasi dan sulit dikelola adalah sampah plastik. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampah plastik menyumbang sekitar 18,71% dari total komposisi sampah nasional.[4] Indonesia juga menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Maraknya penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong belanja, botol, dan kemasan makanan menjadi penyebab utama. Dengan sifatnya yang sulit terurai, sampah plastik berpotensi mencemari sumber air dan tanah, mengancam kesehatan manusia, dan kelangsungan hidup satwa liar.

Di sisi lain, kesenjangan ekonomi berbasis gender merupakan isu yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial-ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perempuan, terutama yang hidup di wilayah pesisir, desa, dan pinggiran perkotaan, sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan layak, pendidikan vokasional, kepemilikan aset, dan akses pembiayaan usaha. Keterbatasan ini tidak hanya berakar pada faktor ekonomi, melainkan juga pada norma sosial-budaya yang memposisikan perempuan pada ranah domestik dan menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Akibatnya,

[4] Pradipta Pandu, "*Setahun target 100 persen pengelolaan sampah belum signifikan*" Kompas.id, diakses 1 Februari, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/07/18/belum-ada-peningkatan-signifikan-menuju-satu-tahun-target-100-persen-pengelolaan-sampah

perempuan mengalami eksklusi dari proses pembangunan ekonomi yang seharusnya inklusif dan setara.

Fenomena ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia hanya sekitar 54,2%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai lebih dari 80%.[5] Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan akses terhadap peluang kerja, tetapi juga menggambarkan hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk berkembang secara ekonomi. Hal ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja berada di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Kondisi yang saling terkait antara krisis lingkungan dan ketimpangan sosial, khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan, menuntut adanya pendekatan transformatif yang mampu menjawab kedua persoalan tersebut secara simultan. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam bentuk regulasi maupun edukasi, namun upaya pengelolaan sampah di beberapa daerah mengalami hambatan permasalahan pergantian

[5] Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*, diakses 20 Juli, https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/f8c567805aa8a6977bd4594a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2023.html

kepemimpinan dan pendanaan yang tidak jelas.[6] Sementara itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan juga telah dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses permodalan, dan pembentukan kelompok usaha, tetapi hasilnya masih terbatas karena belum menyentuh akar permasalahan struktural seperti norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan secara aktif dalam ekonomi. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah sering kali bersifat simbolik dan hanya ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tanpa membangun model kolaboratif yang berkelanjutan.

Melihat kompleksitas dan saling terkaitnya persoalan tersebut, dibutuhkan pendekatan inovatif yang tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor. Salah satu pendekatan yang dinilai memiliki potensi sinergis dan berorientasi jangka panjang adalah kewirausahaan sosial, yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penciptaan dampak yang berkelanjutan.[7] Kewirausahaan sosial dapat menjadi solusi alternatif yang inovatif dan berdampak dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya dalam isu pengelolaan sampah dan kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Kewirausahaan sosial berupaya mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan melakukan inovasi sosial yang

---

[6] Cicin Yulianti, "*Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar ke-2 di Dunia, Ini Penyebabnya,*" Detikedu, diakses 1 Februari, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya.

[7] Muhammad Yunus, "Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism," *Global Urban Development Magazine* 4 (2008): 1–19.

berfokus menciptakan nilai dan dampak sosial.[8] Pendekatan ini juga bersifat kolaboratif dan partisipatif karena dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta hingga pemerintah. Kolaborasi ini menjadi penting dalam memastikan keberlangsungan dampak dan memperluas jangkauan program serta menciptakan sinergi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.

Fenomena kewirausahaan sosial memiliki perbedaan dengan studi kewirausahaan kontemporer karena menawarkan paradigma baru yang menggabungkan misi sosial dengan pendekatan kewirausahaan.[9] Tak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, kewirausahaan sosial berfokus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya masyarakat marjinal.[10] Kewirausahaan sosial juga memiliki pendekatan yang strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan karena kewirausahaan sosial dapat menjembatani pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Kewirausahaan sosial dapat secara langsung berkontribusi pada berbagai tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, pembangunan ekonomi yang inklusif, konsumsi dan produksi berkelanjutan, hingga perlindungan ekosistem darat dan laut.

---

[8] Kim Alter, *Social Enterprise Typology* (Washington: Virtue Venture LLC, 2007).
[9] J. Gregory Dees, *The Meaning of "Social Entrepreneurship"* (Kansas City, MO and Palo Alto: The Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 1998), https://web.stanford.edu/class/e145/2007_fall/materials/dees_SE.pdf.
[10] Johanna Mair and Ignasi Martí, "Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight," *Journal of World Business* 41 (2006): 36–44, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.002.

Popularitas fenomena ini secara global ditandai dengan munculnya Grameen Bank di Bangladesh oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983. Fenomena kewirausahaan sosial berperan sebagai fondasi strategis yang melahirkan usaha sosial sebagai instrumen operasionalnya. Usaha sosial atau *social enterprise* merupakan bentuk nyata dari praktik kewirausahaan sosial. Social enterprise merupakan entitas bisnis yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan menciptakan dampak sosial.[11] Pertumbuhan usaha sosial di Indonesia ditandai dengan munculnya entitas usaha baru yang berfokus mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Gambar 1.1 Pergerakan Jumlah Usaha Sosial di Indonesia Tiap Tahun

Sumber: Laporan Survei Platform Usaha Sosial, 2018

[11] Johanna Mair, "Social Entrepreneurship: Taking Stock and Looking Ahead," in *Handbook of Research on Social Entrepreneurship*, ed. Alain Fayolle and Harry Matlay (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2010), 15-28.

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa pergerakan usaha sosial di Indonesia selama lima tahun berturut-turut selalu mengalami peningkatan.[12] Jumlah usaha sosial yang berdiri terus bertumbuh dan berkembang di berbagai sektor. Hal ini menandai menguatnya keberadaan usaha sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan dari British Council pada 2018 jumlah wirausaha sosial di Indonesia diperkiraan mencapai 342 ribu pelaku usaha sosial.[13] Perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya solusi bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada dampak sosial.

Gambar 1.2 Persentase Persebaran Sektor Usaha Sosial di Indonesia

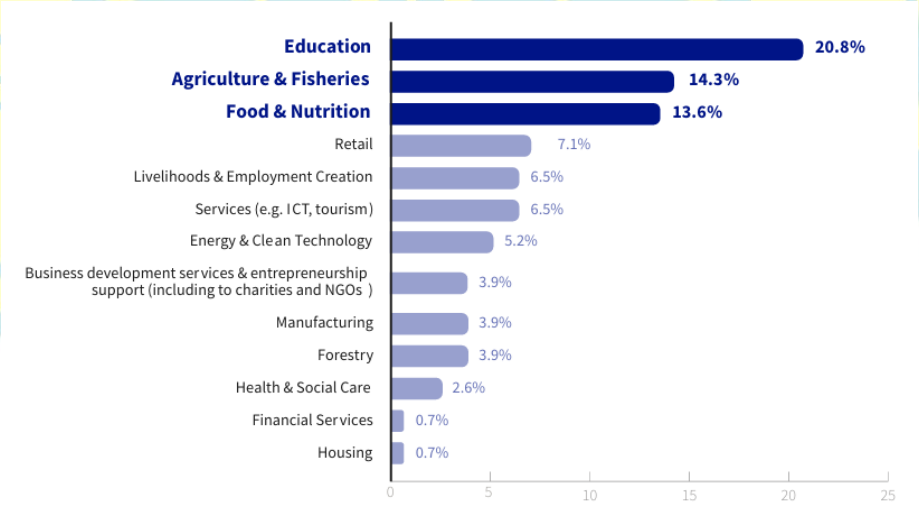

Sumber: Laporan Survei Platform Usaha Sosial, 2022

[12] PLUS, *Laporan Survei: Memahami Keadaan dan Profil Usaha Sosial di Indonesia* (Jakarta: Platform Usaha Sosial, 2018), diakses 1 Maret 2025, https://usahasosial.com/id/layanan/understanding-the-state-and-profile-of-social-enterprises-in-indonesia/

[13] Santika, "*Wirausaha Sosial Indonesia Semakin Menjamur, Bagaimana Pendapatannya?*" Katadata, diakses 1 Maret, https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/5d87502f31f1a17/wirausaha-sosial-indonesia-semakin-menjamur-bagaimana-pendapatannya

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa usaha sosial tersebar ke dalam beberapa sektor mulai dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Sektor yang paling mendapat perhatian adalah pendidikan sebesar 20,8%, diikuti oleh pertanian dan perikanan sebesar sebesar 14,3%, serta pangan dan gizi sebesar 13,6%.[14] Walaupun usaha sosial yang bergerak di bidang lingkungan belum sepenuhnya mendapat perhatian, eksistensinya dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya melalui sektor industri daur ulang. Saat ini, terdapat sekitar 241 industri daur ulang sampah plastik di Indonesia yang memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekosistem lingkungan.[15]

Salah satu usaha sosial yang termasuk ke dalam industri daur ulang sampah plastik di Indonesia adalah Rappo Indonesia. Rappo Indonesia merupakan sebuah usaha daur ulang sampah melalui inovasi *upcycling* sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan yang bernilai ekonomis. Berdirinya Rappo Indonesia berawal dari misi mengatasi permasalahan sampah plastik yang terjadi di Makassar. Tak hanya mengatasi masalah lingkungan, Rappo Indonesia juga turut memberdayakan masyarakat khususnya perempuan sejahtera dengan memberikan pengembangan kapasitas untuk mengolah sampah plastik menjadi produk yang praktis dan bernilai.

---

[14] PLUS, *Understanding the State and Profile of Social Enterprises in Indonesia* (Jakarta: Platform Usaha Sosial, 2022), diakses 1 Maret 2025, https://usahasosial.com/layanan/understanding-the-state-and-profile-of-social-enterprises-in-indonesia/

[15] Dwitri Waluyo, "*Ekonomi Sirkular Daur Ulang Sampah*", Indonesia.go.id, diakses 1 Maret https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8382/ekonomi-sirkular-daur-ulang-sampah?lang=1

Rappo tidak hanya fokus pada hasil produk akhir, tetapi juga menekankan pentingnya proses produksi yang inklusif, yakni dengan melibatkan perempuan pra-sejahtera dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberi solusi terhadap masalah sampah plastik, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat marginal.

Melalui praktik kewirausahaan sosial yang dijalankan, Rappo Indonesia merepresentasikan upaya konkret dalam menjawab dua tantangan besar sekaligus, yakni pengelolaan sampah plastik dan kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Dengan memadukan inovasi lingkungan dan pemberdayaan sosial dalam satu kerangka usaha, Rappo tidak hanya menciptakan produk yang bernilai ekonomis, tetapi juga menanamkan nilai keberlanjutan dalam setiap proses bisnisnya. Model usaha seperti ini menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam karena menawarkan pendekatan yang tidak sekadar pragmatis, tetapi transformatif. Artinya, strategi yang dijalankan tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga membangun perubahan struktural dalam praktik ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan aktif perempuan pra-sejahtera sebagai bagian dari rantai produksi sosial menunjukkan bagaimana strategi kewirausahaan sosial dapat memperkuat posisi kelompok marjinal sekaligus menciptakan nilai bersama (*shared value*).

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang penting untuk mengkaji secara lebih mendalam strategi kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh Rappo Indonesia dalam membangun nilai keberlanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi persoalan sampah plastik

dan kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan tidak harus dilakukan secara terpisah, melainkan dapat diintegrasikan dalam satu model usaha yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan. Sampah plastik, yang umumnya dipersepsikan sebagai limbah tidak berguna, dan perempuan dari kelompok ekonomi rentan, yang kerap dianggap hanya sebagai penerima bantuan, dalam konteks ini justru dijadikan sebagai fondasi utama untuk membangun dampak sosial yang positif dan terukur. Keterlibatan perempuan pra-sejahtera sebagai bagian dari rantai nilai dalam pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial bukan hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang mendalam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kewirausahaan sosial di Indonesia, yang hingga kini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan belum banyak mengangkat studi kasus berbasis praktik lokal yang berhasil. Dengan menelaah pengalaman Rappo Indonesia, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan strategi bisnis yang diterapkan, tetapi juga mengungkap dinamika sosial yang melatarbelakangi terbentuknya inisiatif ini sebagai sebuah usaha sosial. Secara khusus, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor anteseden yang mendorong lahirnya Rappo, bagaimana elemen-elemen kewirausahaan sosial termanifestasi dalam proses operasionalnya, serta strategi yang digunakan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan. Oleh karena itu, penulis mengkaji fenomena tersebut

dalam skripsi yang berjudul **"Strategi Kewirausahaan Sosial dalam Membangun Nilai Keberlanjutan (Studi Kasus Rappo Indonesia di Depok)"**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Kewirausahaan sosial merupakan sebuah pendekatan inovatif dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial melalui mekanisme bisnis yang berkelanjutan. Rappo Indonesia, sebagai sebuah entitas bisnis yang mengusung misi sosial dan keberlanjutan ekonomi, berperan penting dalam menciptakan nilai sosial dan menjaga keberlangsungan usahanya. Pengetahuan mengenai proses terbentuknya praktik kewirausahaan sosial sangat penting untuk mengetahui motivasi dan latar belakang yang mendorong Rappo Indonesia beroperasi sebagai wirausaha sosial. Di samping itu, perlu juga diketahui apakah sebagai salah satu entitas usaha sosial, Rappo telah mengimplementasikan elemen-elemen kewirausahaan sosial dalam operasional bisnisnya. Lebih lanjut, akan diidentifikasi pula strategi yang dilakukan oleh Rappo Indonesia dalam membangun nilai sosial yang menjadi tujuan utama kewirausahaan sosial, yakni menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengarahkan penelitian agar terfokus pada aspek-aspek yang relevan, sebagai berikut.

1. Apa saja faktor-faktor anteseden yang mendorong terbentuknya praktik kewirausahaan sosial di Rappo Indonesia?
2. Bagaimana elemen-elemen kewirausahaan sosial termanifestasi dalam praktik bisnis sosial Rappo Indonesia?

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rappo Indonesia dalam membangun nilai keberlanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor anteseden yang mendorong terbentuknya praktik kewirausahaan sosial di Rappo Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan manifestasi elemen-elemen kewirausahaan sosial dalam praktik bisnis Rappo Indonesia.
3. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Rappo Indonesia dalam strategi membangun nilai keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari sisi akademis dan praktis, sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian yang berjudul "Praktik Kewirausahaan Sosial pada Usaha Daur Ulang Sampah Plastik: Studi Kasus Rappo Indonesia" ini diharapkan mampu:

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai inovasi dan kewirausahaan sosial, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan perempuan dengan menghadirkan studi kasus kontekstual dari industri daur ulang sampah di Indonesia, yaitu Rappo Indonesia.
2) Memperkaya literatur mengenai bidang inovasi dan kewirausahaan sosial dalam merumuskan tujuan sosial, menciptakan inovasi, dan membangun model bisnis yang responsif terhadap tantangan sosial dan lingkungan.
3) Memberikan referensi atau landasan awal bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan konsep kewirausahaan yang berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, sebagai berikut.

1) Bagi Rappo Indonesia

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi strategis dalam mengembangkan usaha sosial Rappo Indonesia dan membantu Rappo Indonesia merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisinya sebagai kewirausahaan sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat.

2) Bagi Pelaku Kewirausahaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik kewirausahaan sosial yang menginspirasi pelaku usaha sosial lainnya, terutama yang berfokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan perempuan.

3) Bagi Masyarakat atau Komunitas

Penelitian ini dapat mendorong kesadaran dan kepercayaan dari masyarakat atau komunitas dalam melihat usaha sosial sebagai agen perubahan sosial sehingga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan komunitas.

4) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan sosial dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pencaipain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Skema 1.1 Peta Literatur

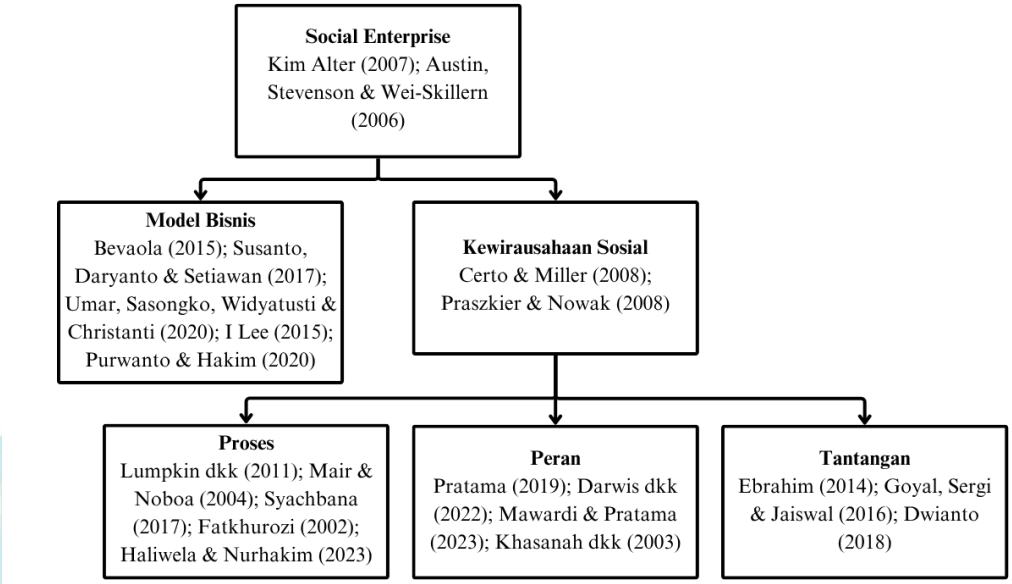

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang akan dikaji untuk memperoleh interpretasi yang komprehensif mengenai proses kewirausahaan sosial. Oleh karena itu, penulis mempelajari dengan cermat beberapa literatur sejenis yang berasal dari buku, jurnal internasional, jurnal nasional, dan skripsi. Hal ini dilakukan penulis dalam membangun dasar yang kuat, mengidentifikasi secara mendalam, dan menghindari duplikasi, sehingga penulis dapat mengelaborasi kerangka teori dan argumen serta menghindari kesalahan.

Dimulai dengan penjelasan mengenai *social enterprise*. *Social enterprise* atau usaha sosial adalah entitas bisnis yang berfokus menciptakan nilai sosial untuk

menyelesaikan masalah sosial atau kegagalan dengan beroperasi sesuai disiplin keuangan, inovasi, dan tekad bisnis. Praktik *social enterprise* ini muncul karena upaya organisasi nirlaba untuk mencapai keberlanjutan akibat menurunnya dukungan dari sumber-sumber tradisional, filantropi, dan pemerintah.[16] Perusahaan sosial berbeda dengan perusahaan komersial yang teridentifikasi ke dalam empat dimensi, yaitu kesenjangan pasar, fokus tujuan, pendanaan dan pengukuran kinerja. Usaha sosial berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terlayani oleh perusahaan komersial karena kegagalan pasar dengan fokus tujuan pada penciptaan nilai atau dampak. Di samping itu, usaha sosial lebih sulit mendapatkan dana dari investor dan pengukuran kinerja lebih sulit diukur secara kuantitatif.[17]

Social enterprise menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial yang mengacu pada aktivitas penciptaan nilai sosial yang inovatif yang dapat terjadi di dalam atau di seluruh sektor.[18] Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendefinisian peran inovasi yang berupaya menciptakan nilai sosial dan kewirausahaan sosial dapat terjadi di seluruh sektor seperti wirausahawan perorangan, pemerintah, dan organisasi laba maupun nirlaba.[19] Kewirausahaan sosial dibangun dengan misi sosial, inovasi sosial, perubahan sosial, semangat kewirausahaan, dan kepribadian kreatif serta

---

[16] Alter, op. cit., 35.

[17] James E. Austin, Howard Stevenson, and Jane Wei-Skillern, "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?" *Entrepreneurship Theory and Practice* 30 (2006): 1–22, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x.

[18] Ibid.

[19] Samuel T. Certo and Thomas Miller, "Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts," *Business Horizons* 51, no. 4 (2008): 267–271, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2008.02.009.

kemampuan kewirausahaan. Dalam memenuhi definisi wirausaha sosial dibutuhkan kelima dimensi tersebut untuk menghasilkan seorang wirausahawan sosial dengan kualitas yang unggul. Hal ini yang membedakan wirausahawan sosial dengan pemimpin yang bergerak di bidang sosial lainnya.[20]

Usaha sosial dikembangkan dengan model bisnis sebagai kerangka kerja pengambilan keputusan untuk mengembangkan kegiatan yang koheren secara logis untuk mendukung penciptaan nilai yang digerakkan oleh misi sosial. Terdapat enam komponen model bisnis yang dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat fondasi dan tingkat kinerja. Tingkat fondasi terdiri dari proposisi nilai, struktur hukum dan tata kelola, cakupan pasar, dan kegiatan berjejaring. Sedangkan, tingkat kinerja terdiri dari sumber daya dan keberlanjutan.[21] Apabila wirausaha sosial memiliki peluang pasar, ide bisnis yang inovatif, sumber daya yang baik, dan wirausahawan yang berbakat, namun kekurangan model bisnis yang mendasari maka usaha sosial seringkali mengalami kegagalan.[22] Oleh karena itu, diperlukan model bisnis yang mendasari operasi bisnis supaya proses kewirausahaan sosial dapat mencapai misi penciptaan nilai sosial dan hasil yang berdampak.

---

[20] Ryszard Praszkier and Andrzej Nowak, *Social Entrepreneurship: Theory and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2012), 14-20.

[21] Henny Umar, Gagaring Pagalung Sasongko, Trisna Widyastuti, and Yeni Christanti, "Improving the Social Enterprise-Based Business Performance from the Aspect of Social Business Model Canvas," International Journal of Entrepreneurship 24, no. 1 (2020): 1–12.

[22] Inkyu Lee, "A Social Enterprise Business Model for Social Entrepreneurs: Theoretical Foundations and Model Development," International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation 3, no. 4 (2015): 269–301.

Proses kewirausahaan dalam konteks sosial memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kewirausahaan komersial. Hal ini dapat dilihat dari anteseden atau intensi dan outcomes atau hasil dari proses kewirausahaan sosial. Namun, beberapa dimensi proses orientasi kewirausahaan tetap berfungsi sama yang membedakan hanya terletak pada tujuan sosial dan hasil yang ingin dicapai. Analisis misi sosial, identifikasi peluang, akses terhadap sumber daya, otonomi, dan agresivitas kompetitif berfungsi sebagai elemen yang dapat membedakan proses kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan komersial.[23]

Di samping itu, niat perilaku seorang wirausahawan sosial dipengaruhi oleh keinginan untuk melakukan perubahan positif. Keinginan ini dipengaruhi oleh motivasi internal dan keyakinan akan kemampuan mewujudkan usaha sosial. Motivasi internal mencakup sikap empati terhadap permasalahan sosial dan penilaian moral atas pentingnya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sementara, keyakinan bergantung pada dukungan sosial dan efikasi diri, yaitu kepercayaan atas kapasitas pribadi dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi membangun wirausaha sosial mengindikasikan bahwa pembentukan usaha sosial adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana.[24]

---

[23] Lumpkin, G. T., T. W. Moss, D. M. Gras, S. Kato, dan A. S. Amezcua, "Entrepreneurial Processes in Social Contexts: How Are They Different, If at All?" *Small Business Economics* 40, no. 3 (2013): 761–783.

[24] Mair & Noboa, "Social entrepreneurship: How intentions to create a social enterprise get formed", *SSRN Electronic Journal*, 2003.

Peran kewirausahaan sosial pun mendorong perubahan positif bagi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang ada. Melalui inovasi yang dikembangkan, wirausaha sosial membawa masyarakat menuju kesadaran dan kemandirian, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.[25] Tidak hanya menciptakan solusi yang berdampak langsung, kewirausahaan sosial juga membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya sendiri.

Tantangan dalam menjalankan usaha sosial bersangkutan pada proposisi nilai dan aksi. Pada proposisi nilai melibatkan tantangan pengelolaan lingkungan dan dilema sosial-ekonomi, pengaturan pasar, kesadaran dan penerimaan, keterbatasan sumber daya, pengaturan organisasi, legitimasi, dan skalabilitas. Pada tantangan aksi, kewirausahaan sosial belum mempunyai kerangka kerja penilaian dampak sosial yang memadai dan kewirausahaan sosial masih kurang tanggap bertindak secara strategis. Tantangan kuantifikasi dan penilaian standar kinerja sosial ini menjadi salah satu tantangan besar.[26]

Usaha sosial sebagai organisasi hibrida yang menggabungkan tujuan sosial dan komersial terletak pada misi sosial dan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan. Dari dualisme ini muncul risiko *mission drift* atau tujuan organisasi menyimpang dari

---

[25] M. A. Khasanah, Z. B. A. M. Arifin, A. Muktamar, dan M. Satiadharma, "Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science* 1, no. 03 (2023): 226–235.

[26] Goyal, Sergi, and Jaiswal, "Understanding the Challenges and Strategic Actions of Social Entrepreneurship at Base of the Pyramid," *Management Decision* 54, no. 2 (2016): 418–440.

tujuan sosial saat berusaha mendapatkan keuntungan.[27] Selain itu, usaha sosial dapat menghadapi ruang kerentanan atau *spaces of vulnerability*. Ruang kerentanan ini ibarat titik tegang dan rentan, muncul ketika dua tujuan bertentangan yang menyebabkan pergeseran fokus dari tujuan.[28]

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Kemunculan kewirausahaan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks kegagalan institusi-institusi konvensional baik negara, sektor swasta, maupun lembaga filantropi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, fenomena kewirausahaan sosial hadir sebagai suatu proses yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar secara lokal dengan tujuan memodifikasi tatanan sosial dan ekonomi.[29]

Konsep kewirausahaan sosial tidak terlepas dari kewirausahaan tradisional, atau dapat dikatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan evolusi dari

---

[27]Ebrahim, Battilana, and Mair, "The Governance of Social Enterprises: Mission Drift and Accountability Challenges in Hybrid Organizations," *Research in Organizational Behavior* 34 (2014): 81–100.

[28] Lutz, Petrini, and Delgado, "Beyond Mission Drift: Understanding the Spaces of Vulnerability in Social Enterprises' Missions," *Social Enterprise Journal* 19, no. 5 (2023): 519–535.

[29] Praszkier and Nowak, op. cit., 9-11.

kewirausahaan konvensional. Keduanya mendayagunakan fondasi yang sama, yaitu mengandalkan peran aktif individu atau kelompok dalam mengenali peluang, mengambil risiko, menciptakan inovasi, dan membentuk organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada orientasi tujuannya. Kewirausahaan konvensional mengarah pada pencapaian keuntungan finansial (*profit-oriented*), sedangkan kewirausahaan sosial mengarah pada pencapaian nilai sosial dan dampak yang berkelanjutan (*impact-oriented*).[30]

Konsep kewirausahaan sosial mulai dikembangkan secara akademik oleh Dr. Gregory Dees, yang dianggap sebagai salah satu pelopor dalam merumuskan dasar-dasar teoritis kewirausahaan sosial. Dalam pandangannya, kewirausahaan sosial merupakan pendekatan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial melalui prinsip-prinsip kewirausahaan. Dees menekankan bahwa inti dari kewirausahaan sosial bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, melainkan pada penciptaan nilai sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat secara luas.

Kewirausahaan sosial juga ditandai dengan kemampuan dalam mengejar peluang baru, terutama dalam situasi atau lingkungan yang kurang dilirik oleh sektor bisnis konvensional. Para wirausahawan sosial diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan, baik melalui inovasi produk, pendekatan layanan, maupun model bisnis yang unik, guna menjawab tantangan sosial yang

[30] Rizqyansyah Fitramadhana, "Genealogi Kewirausahaan Sosial," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 1 (t.t.): 64–83.

kompleks. Hal ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, melakukan pembelajaran berkelanjutan, dan menyusun strategi yang fleksibel untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Dees menegaskan bahwa kewirausahaan sosial mensyaratkan keberanian untuk bertindak tanpa dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Artinya, keterbatasan finansial, akses teknologi, atau jaringan bukan menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Justru dalam keterbatasan tersebut, lahir semangat pantang menyerah dan kreativitas untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan membentuk strategi dalam pengembanganya. Selain itu, kewirausahaan sosial juga memuat unsur akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam pelaksanaan misi sosial. Para pelaku tidak hanya bertanggung jawab kepada pemodal atau donatur, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam penggunaan sumber daya, konsistensi dalam mencapai tujuan sosial, serta integritas dalam menjalin kepercayaan publik.[31]

Konsep kewirausahaan sosial terwujud secara nyata melalui praktik-praktik kewirausahaan sosial. Rappo Indonesia merupakan salah satu contoh usaha sosial di Indonesia yang secara nyata menerapkan praktik kewirausahaan sosial. Usaha ini bergerak dalam bidang daur ulang sampah plastik, yang dikombinasikan dengan upaya pemberdayaan perempuan dari komunitas marginal. Dengan memproduksi barang-barang kerajinan berbahan dasar limbah plastik, Rappo Indonesia tidak

[31] Gregory Dees, loc. cit.

hanya memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok yang rentan secara sosial.

1.6.2 Anteseden dalam Praktik Kewirausahaan Sosial

Dalam praktik kewirausahaan sosial terdapat anteseden yang merujuk pada faktor-faktor yang mendahului terbentuknya praktik kewirausahaan sosial. Faktor-faktor ini dapat dikatakan sebagai sebuah proses dalam mendorong munculnya tindakan kewirausahaan yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial. Tahapan ini menjadi suatu proses yang khas dan unik dalam konsep kewirausahaan sosial. Hal ini karena pembentukan praktik kewirausahaan tidak hanya didorong oleh peluang pasar, namun didorong juga oleh permasalahan sosial dan misi sosial yang hendak dicapai.

Menurut Lumpkin, anteseden dalam praktik kewirausahaan sosial meliputi, motivasi dan misi sosial, identifikasi peluang melalui pemecahan masalah, akses permodalan dan pembiayaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Keempat anteseden ini merupakan dasar dalam memahami proses dan arah strategis organisasi sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan dampak sosial jangka panjang.[32]

Motivasi sosial merupakan pendorong utama yang membedakan kewirausahaan sosial dari kewirausahaan komersial. Orientasi utama wirausaha

[32] Lumpkin et al., loc. cit.

sosial terletak pada pencapaian tujuan sosial yang menyasar permasalahan masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kesehatan, dan isu lingkungan. Misi ini tidak berfokus pada keuntungan semata, tetapi pada dampak sosial jangka panjang. Dengan demikian, motivasi sosial dan misi bukan sekadar latar belakang, tetapi menjadi fondasi dari seluruh tindakan dan keputusan kewirausahaan sosial.

Berbeda dengan kewirausahaan komersial yang melihat peluang dari sisi pasar dan keuntungan finansial, kewirausahaan sosial memandang masalah sosial sebagai peluang inovasi. Kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi terutama pada kelompok marjinal menjadi sumber peluang yang dapat ditangani melalui pendekatan kewirausahaan. Kemampuan untuk mengenali dan merespons peluang ini sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap nilai sosial serta sumber daya yang tersedia. Keberhasilan dalam mengidentifikasi peluang tercermin dari dukungan komunitas, partisipasi masyarakat, dan penerimaan terhadap solusi yang ditawarkan.[33]

Keterbatasan akses modal merupakan tantangan utama dalam kewirausahaan sosial. Meskipun tidak sepenuhnya membedakan dari kewirausahaan komersial, keterbatasan ini menjadi lebih signifikan karena model usaha sosial sering kali menghadapi kesulitan dalam menjanjikan arus kas atau profitabilitas yang menarik bagi investor konvensional. Akibatnya, wirausaha

[33] Ibid.

sosial harus mengandalkan pembiayaan alternatif, seperti hibah, donasi, dan dukungan dari lembaga filantropi atau pemerintah.[34] Tantangan dalam memperoleh modal ini juga memperlihatkan adanya persaingan langsung dengan usaha komersial dalam memperebutkan sumber daya dan perhatian konsumen.

Kewirausahaan sosial melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dibandingkan bisnis pada umumnya. Selain pemangku kepentingan tradisional seperti investor, karyawan, dan konsumen, usaha sosial juga harus melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, serta kelompok penerima manfaat secara langsung. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan ini memberi legitimasi pada usaha sosial dan memperkuat akuntabilitas sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, struktur kepemilikan kolektif yang melibatkan masyarakat lokal memberikan mereka kekuasaan untuk memengaruhi arah dan kebijakan organisasi secara langsung.[35]

1.6.3 Elemen-elemen dalam Praktik Kewirausahaan Sosial

Praktik kewirausahaan sosial terbentuk bukan hanya dari aktivitas ekonomi dan misi sosial. Secara lebih mendalam, Lars Hulgard menjelaskan kewirausahaan sebagai praktik sosial-politik yang membawa transformasi struktural dalam masyarakat. Praktik tersebut dibentuk oleh empat elemen kunci, yang terdiri dari

---

[34] M. Fatkhurozi, *Proses Kewirausahaan Sosial Melalui Usaha Kedai Kopi oleh Penyandang Disabilitas Tuli dalam Upaya Menghubungkan Teman Dengar dan Teman Tuli* (Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Indonesia, 2022).

[35] A. A. Syachbana, *Proses Kewirausahaan Sosial pada PT. Waste4Change Alam Indonesia di Bekasi* (Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

penciptaan nilai sosial, kolaborasi dengan masyarakat sipil, inovasi sosial, dan aktivitas ekonomi.[36]

Kewirausahaan sosial pada dasarnya berorientasi pada penciptaan nilai sosial, yaitu kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan atau kurang terlayani. Nilai sosial ini dapat berupa pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, akses pendidikan, pelestarian lingkungan, atau penguatan kohesi sosial. Tidak seperti kewirausahaan komersial yang berfokus pada keuntungan ekonomi, kewirausahaan sosial memprioritaskan perubahan sosial yang berkelanjutan sebagai tujuan utamanya. Nilai sosial menjadi ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar laba finansial. Penciptaan nilai sosial ini dapat dituangkan ke dalam misi sosial sebagai upaya dalam menciptakan dampak sosial.

Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial tidak bekerja secara terisolasi, melainkan dibangun melalui kolaborasi aktif dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan kelompok warga. Kolaborasi ini memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dan melibatkan mereka sebagai subjek, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Partisipasi ini memperkuat legitimasi sosial serta menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap proses perubahan yang terjadi.

---

[36] M. Palesangi, "PEMUDA INDONESIA DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL," *Seminar Nasional Competitive Advantage 2012*, vol. 1, no. 2.

Elemen penting lain dalam kewirausahaan sosial adalah inovasi sosial, yaitu pengembangan pendekatan baru yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan sosial. Inovasi ini bisa berupa metode pemberdayaan komunitas, model bisnis berbasis lingkungan, atau sistem distribusi yang menjangkau kelompok terpinggirkan. Inovasi sosial menuntut keberanian untuk keluar dari cara-cara konvensional dan menciptakan solusi yang adaptif terhadap konteks lokal, serta mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki orientasi sosial, kewirausahaan sosial umumnya tetap melibatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan misi sosialnya. Aktivitas ini bisa berupa produksi barang, penyediaan jasa, atau kegiatan perdagangan lainnya yang menghasilkan pendapatan. Namun, berbeda dari entitas bisnis murni, keuntungan yang diperoleh tidak untuk akumulasi pribadi, melainkan digunakan untuk mendukung tujuan sosial dan memperluas dampak. Dengan demikian, dimensi ekonomi dalam kewirausahaan sosial berfungsi sebagai fondasi keberlanjutan organisasi, bukan sebagai tujuan akhir.[37]

1.6.4 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep multidimensional yang merujuk pada upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial,

[37] Lars Hulgard, Discourses of Social Entrepreneurship: Variation of The Same Theme? (*EMES European Research Network*, 2010).

dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Gagasan ini melihat pembangunan dalam perspektif jangka panjang yakni tidak hanya melihat dari keuntungan ekonomi semata, namun harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial untuk masa kini dan masa depan. Paradigma ini telah menjadi sebuah diskursus pembangunan global yang menawarkan alternatif fundamental terhadap model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pada praktiknya, orientasi pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan degradasi lingkungan dan eksklusi sosial, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi generasi kini maupun mendatang.[38]

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi utama yang menjadi pilar fundamental dalam perumusannya, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam implementasinya, ketiga dimensi ini harus dijalankan secara terintegrasi agar dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan di satu bidang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap bidang lainnya, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

[38] Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 9.

yang holistik dan berkelanjutan. Dimensi ini dibahas oleh Kates dkk dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan.[39]

Dimensi pertama yang dikemukakan adalah lingkungan atau *nature*, yang memiliki fokus utama dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan dasar dari seluruh proses pembangunan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan. Menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan sumber daya alam, dan memastikan daya dukung bumi tidak terlampaui adalah syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa lingkungan yang sehat, upaya pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dimensi yang kedua pada aspek sosial menyoroti pentingnya kesejahteraan manusia berdasarkan pada prinsip keadilan dan inklusi. Pembangunan pada aspek sosial memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian serta ekonomi. Inklusi sosial sendiri menjadi upaya dalam mencegah terjadinya marginalisasi kelompok rentan dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Pembangunan sosial yang berkelanjutan harus mampu mendistribusikan manfaat secara adil tanpa mengorbankan kelompok tertentu.

---

[39] Robert W. Kates, Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz, *"What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice," Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47, no. 3 (2005): 8–21.

Adapun dimensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekologis. Aktivitas ekonomi seharusnya menciptakan kemakmuran yang inklusif, adil, dan mampu bertahan terhadap krisis. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. Dengan demikian, eksploitasi alam secara berlebihan harus dihindari demi menjamin keberlanjutan jangka panjang. Ekonomi yang berkelanjutan adalah ekonomi yang berkembang dalam batas-batas ekologis dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

Salah satu perkembangan penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pada dimensi kelembagaan yang diuraikan oleh Keiner.[40] Kelembagaan menjadi komponen kunci dalam memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan. Organisasi atau sistem yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai agar dapat mengarahkan, mengatur, dan mendukung pelaksanaan program secara efisien. Tanpa struktur kelembagaan yang kuat, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit diwujudkan secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, tidak hanya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi turut mencakup keberadaan dan peran institusi atau kelembagaan.

[40] Pertiwi, op. cit., 12.

1.6.4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi memerlukan adanya pendekatan yang bersifat implementatif dan dapat diukur untuk memastikan relevansi dalam berbagai konteks praktik dan kebijakan pembangunan. Sebagai bentuk aksi kolektif, komunitas internasional merumuskan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang secara resmi diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Agenda ini memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kerangka aksi global yang terstruktur, dengan 169 target dan lebih dari 200 indikator yang dirancang untuk mengartikulasikan dan mengoperasionalkan empat pilar utama pembangunan berkelanjutan.[41]

Keempat pilar tersebut mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan yang holistik antara tiga dimensi utama pembangunan, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang kemudian diperkuat dengan dimensi tata kelola (*governance*) sebagai pilar pendukung. setiap pilar berfungsi sebagai landasan bagi perumusan kebijakan dan strategi implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga

[41] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, General Assembly Resolution A/RES/70/1 (New York: United Nations, 2015), https://sdgs.un.org/2030agenda.

keterkaitan antar pilar menjadi kunci untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berikut ini adalah klasifikasi tujuh belas target ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan.[42]

Tabel 1.1 Klasifikasi SDGs Berdasarkan Tiga Pilar Keberlanjutan dan Peran Tata Kelola

<table>
<tr><th>Pilar Pembangunan Sosial</th><th>Pilar Pembangunan Ekonomi</th><th>Pilar Pembangunan Lingkungan</th><th>Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola</th></tr>
<tr><td>Tujuan No. 1 Tanpa Kemiskinan</td><td>Tujuan No. 7 Energi Bersih dan Terjangkau</td><td>Tujuan No. 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak</td><td rowspan="7">Tujuan No. 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</td></tr>
<tr><td>Tujuan No. 2 Tanpa Kelaparan</td><td>Tujuan No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</td><td>Tujuan No. 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan</td></tr>
<tr><td>Tujuan No. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</td><td>Tujuan No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</td><td>Tujuan No. 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab</td></tr>
<tr><td>Tujuan No. 4 Pendidikan Berkualitas</td><td>Tujuan No. 10 Berkurangnya Kesenjangan</td><td>Tujuan No. 13 Penanganan Perubahan Iklim</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan No.5 Kesetaraan Gender</td><td rowspan="2">Tujuan No. 17 Kemitraan untuk mencapai Tujuan</td><td>Tujuan No. 14 Ekosistem Laut</td></tr>
<tr><td>Tujuan No. 15 Ekosistem Daratan</td></tr>
</table>

Sumber: Alisjahbana & Murniningtyas, 2018[43]

Dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan merupakan perluasan dari agenda MDGs dengan penambahan sejumlah elemen baru

[42] Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 63-68.
[43] Ibid.

yang menekankan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Upaya pengentasan kemiskinan ditingkatkan menjadi upaya penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, melalui penyediaan perlindungan sosial (Tujuan 1) serta perluasan akses yang setara untuk memberdayakan masyarakat miskin agar tangguh terhadap berbagai kerentanan sosial, ekonomi, bencana, dan perubahan iklim. Upaya untuk mengakhiri kelaparan difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, sekaligus mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan (Tujuan 2), dengan dukungan investasi pada infrastruktur pertanian, kerja sama internasional, reformasi kebijakan perdagangan yang tidak adil, serta penguatan mekanisme pasar guna meredam gejolak harga. Kesehatan masyarakat ditingkatkan melalui cakupan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk seluruh kelompok usia (Tujuan 3), sedangkan pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran sepanjang hayat, serta pengembangan keterampilan bagi generasi muda guna mendukung pekerjaan layak dan kewirausahaan (Tujuan 4). Tujuan mengenai akses air bersih dan sanitasi (Tujuan 6), meskipun memiliki aspek sosial, lebih tepat dikategorikan dalam dimensi lingkungan karena mencakup pengelolaan air yang berkelanjutan, seperti pengendalian pencemaran, efisiensi penggunaan, serta konservasi ekosistem air. Di sisi lain, kesetaraan gender (Tujuan 5) memainkan peran sentral dalam pilar sosial, meskipun implementasinya memiliki dampak lintas dimensi.

Dimensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan mencerminkan perluasan visi pembangunan dengan memasukkan aspek-aspek baru yang sebelumnya belum secara eksplisit tercakup dalam MDGs. Pilar ini mencakup penyediaan akses energi bagi semua lapisan masyarakat sebagai prasyarat penting untuk menunjang sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Energi yang disediakan tidak hanya harus terjangkau, tetapi juga harus bersumber dari energi terbarukan serta mendorong efisiensi penggunaan energi (Tujuan 7). Pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak cukup hanya dari sisi kuantitas, namun harus memiliki keberlanjutan fiskal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sembari membuka ruang bagi aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan. Hal ini selaras dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, produktif, dan inklusif (Tujuan 8). Terkait hal tersebut, pembangunan industri diarahkan pada model yang inklusif dan berkelanjutan, didorong oleh inovasi dan ditopang oleh infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan (Tujuan 9). Selanjutnya, pengurangan ketimpangan (Tujuan 10), yang merupakan tujuan baru dalam kerangka SDGs, menjadi agenda penting yang harus dicapai. Tujuan ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pembangunan, sejalan dengan prinsip universal "*no one left behind*" yang menjadi fondasi moral pelaksanaan Agenda 2030. Terakhir, kemitraan global (Tujuan 17) menjadi landasan strategis bagi implementasi dimensi ekonomi yang

berkelanjutan, dengan mencakup berbagai aspek kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam mendukung sistem ekonomi global yang adil dan tangguh.

Dimensi lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan karena keberlanjutan sosial dan ekonomi sangat bergantung pada kelestarian fungsi ekosistem alam. Pilar ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan seperti akses air bersih dan sanitasi (Tujuan 6) harus selaras dengan perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Upaya pembangunan kota yang inklusif dan berdaya tahan (Tujuan 11), serta perubahan perilaku konsumsi dan produksi (Tujuan 12), perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah. Pengendalian perubahan iklim (Tujuan 13) menjadi fokus utama untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekonomi terhadap dampak krisis iklim yang sudah terjadi. Selain itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di darat dan laut (Tujuan 14 dan 15) sangat penting guna mencegah degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa kini dan mendatang.

Tata kelola dan kemitraan global menjadi elemen krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, SDGs memasukkan tujuan baru yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, stabilitas keamanan, akses terhadap keadilan, serta pembentukan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Tujuan 16).

Kehadiran tujuan ini mencerminkan kesadaran bahwa konflik dan peperangan dapat mengganggu stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, akses terhadap keadilan menjadi sangat penting karena peningkatan konflik, eksploitasi, dan pelanggaran hak dapat menghambat upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, terciptanya sistem hukum dan tata kelola yang adil menjadi landasan penting bagi keberhasilan SDGs.

1.7 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep

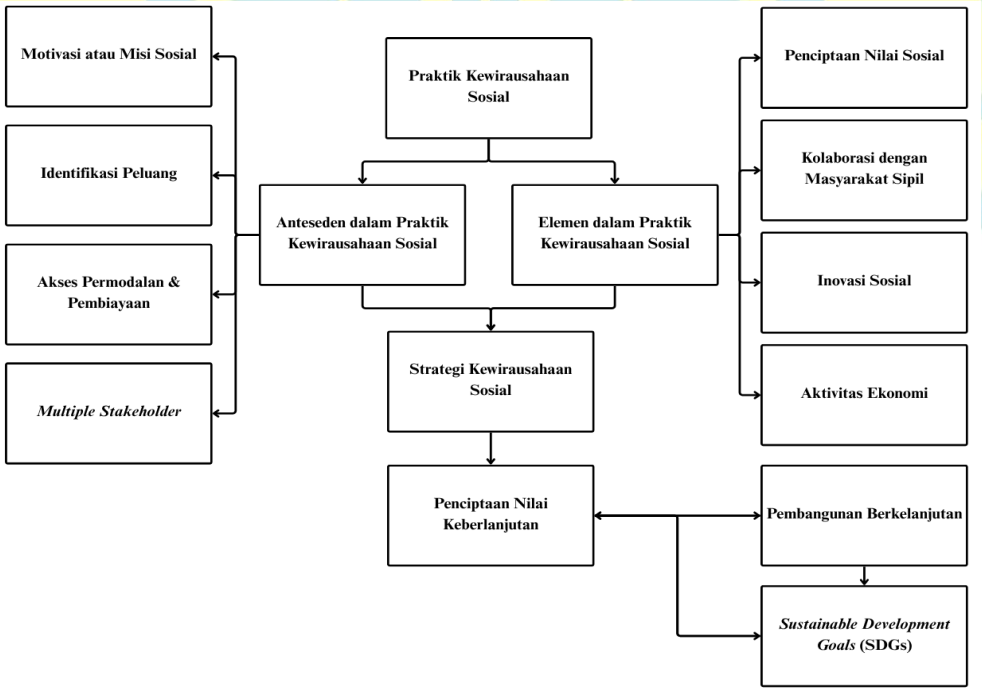

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan skema 1.2 penelitian ini akan menggambarkan praktik kewirausahaan sosial dengan dua aspek utama yang memengaruhi atau membentuk praktiknya, yaitu anteseden dan elemen kewirausahaan dalam praktik kewirausahaan sosial. Kedua aspek ini mengarah pada strategi pengembangan organisasi, yang pada akhirnya menghasilkan dua tujuan utama. Dua tujuan utama tersebut dalam rangka strategi mengelola atau menyelaraskan dualitas tujuan antara tujuan ekonomi dan sosial serta strategi menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan.

Praktik kewirausahaan sosial tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh serangkaian faktor penting yang disebut sebagai anteseden dalam praktik kewirausahaan sosial. Pertama, semuanya bermula dari motivasi atau misi sosial yang kuat. Sebuah keinginan tulus untuk mengatasi masalah atau kebutuhan sosial. Dari misi ini, para wirausaha sosial kemudian harus mampu mengidentifikasi peluang, yaitu melihat masalah sosial sebagai celah untuk menawarkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Tentunya untuk mewujudkan ide tersebut, diperlukan akses permodalan dan pembiayaan yang memadai, baik dari sumber tradisional maupun investasi berdampak sosial. Tak hanya itu, keberhasilan kewirausahaan sosial sangat bergantung pada kemampuan untuk melibatkan dan bekerja sama dengan multiple stakeholder, mulai dari komunitas yang dilayani, pemerintah, hingga investor dan mitra lainnya, karena mereka semua memiliki peran dalam ekosistem ini.

Setelah fondasi anteseden ini terbangun, praktik kewirausahaan sosial kemudian diwujudkan melalui berbagai elemen kunci. Dengan penciptaan nilai sosial sebagai elemen sentral yang berfokus pada upaya menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan finansial. Untuk mencapai hal ini, kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi krusial. Seringkali wirausaha sosial bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau kelompok komunitas lokal untuk memahami masalah secara mendalam dan mengimplementasikan solusi yang relevan. Selain itu, inovasi sosial adalah ciri khas kewirausahaan sosial, di mana pendekatan baru dan kreatif dikembangkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Meskipun berorientasi sosial, kewirausahaan sosial juga harus menjalankan aktivitas ekonomi yang sehat agar dapat mandiri secara finansial dan berkelanjutan.

Baik anteseden maupun elemen-elemen praktik ini secara kolektif membentuk dan memengaruhi strategi kewirausahaan sosial dalam upaya membangun nilai keberlajutan. Dengan maksud, memberikan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat tidak hanya bersifat sementara, melainkan terus berlanjut dan berkembang dari waktu ke waktu, memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan transformatif.

Strategi kewirausahaan sosial berperan penting dalam menciptakan nilai keberlanjutan yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang menggabungkan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, kewirausahaan sosial tidak hanya menawarkan solusi inovatif

terhadap permasalahan sosial, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat jangka panjang dan berdampak luas. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, kewirausahaan sosial berkontribusi dengan menciptakan model usaha yang memberdayakan masyarakat lokal, mengurangi ketimpangan, dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha sosial, seperti pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai atau pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi, merupakan praktik nyata dari pembangunan yang berorientasi keberlanjutan. Selain itu, kontribusi kewirausahaan sosial sangat relevan dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Strategi kewirausahaan sosial dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai tujuan SDGs secara langsung.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, di mana penulis berperan sebagai instrumen kunci untuk menganalisis dan mengkonstruksi makna dari data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah membangun gambaran holistik dan kompleks

mengenai isu atau topik penelitian, sehingga mencerminkan realitas secara utuh sesuai konteksnya.[44]

Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara rinci dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, yaitu faktor anteseden yang mempengaruhi terbentuknya Rappo Indonesia sebagai usaha sosial, elemen dan orientasi kewirausahaan, serta strategi yang dilakukan Rappo Indonesia dalam mewujudkan nilai sosial yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman yang ada di balik hubungan antar konsep tersebut. Metode studi kasus dipilih karena mengarahkan penulis untuk mempelajari secara rinci tentang suatu fenomena dalam konteks spesifik. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam bagaimana proses terbentuknya Rappo Indonesia, praktik dan orientasi kewirausahaannya, serta strategi yang dijalankannya dalam mengembangkan organisasinya.

[44] J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2017), 257–259.

1.8.2 Subjek Penelitian

Tabel 1.2 Karakteristik Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Posisi Informan
1	AI	Founder & Chief Executive Officer (CEO)	Informan Utama
2	AN	Chief Operating Officer (COO)	
3	AL	Marketing & Partnership Officer	
4	TE	Administrative Officer	
5	NK	Ex-Finance & Administration Officer	
6	IV	Penerima Manfaat & Mitra Jahit (Beneficiaries)	Informan Pendukung
7	YN		
8	LL		
9	LN		

Sumber: Diolah Penulis dari Temuan, 2025

Subjek dalam penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi, yakni Rappo Indonesia sebagai entitas usaha sosial. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang yang terdiri dari informan utama dan pendukung. Informan utama terdiri dari pendiri sekaligus CEO, tiga karyawan, dan satu mantan karyawan Rappo Indonesia. Pendiri dan karyawan Rappo Indonesia menjadi fokus utama untuk menggali informasi mengenai proses internal organisasi. Wawancara mendalam dengan mereka bertujuan untuk menguraikan setiap tahapan kewirausahaan sosial, mulai dari bagaimana misi sosial Rappo Indonesia didefinisikan, proses perencanaan strategis program-

program, mekanisme implementasi di lapangan, hingga strategi pengembangan dan keberlanjutan yang diterapkan untuk memastikan dampak jangka panjang. Perspektif mereka akan memberikan gambaran menyeluruh tentang visi, strategi, dan operasional Rappo Indonesia.

Sementara itu, informan pendukung yakni penerima manfaat program sekaligus mitra jahit dipilih untuk mengetahui implementasi riil program dan manfaat konkret yang mereka rasakan. Wawancara dengan para penerima manfaat bertujuan untuk mengetahui efektivitas program, perubahan yang terjadi dalam hidup mereka, serta sejauh mana program Rappo Indonesia telah berhasil mencapai sasaran dan memberikan nilai tambah bagi komunitas yang dilayani. Dengan kombinasi data dari informan-informan tersebut akan menggambarkan bagaimana strategi pengembangan organisasi dalam praktik kewirausahaan sosial di Rappo Indonesia.

1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara luring di Rappo Impact Centre Depok yang berlokasi di Jalan Akses Cening Ampe Blok K/No 1D, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan rumah produksi dan pelatihan bagi mitra jahit dan penerima manfaat di Depok. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara daring melalui Google Meet bersama AI selaku *founder* & CEO Rappo Indonesia serta TE dan NK selaku karyawan dan mantan karyawan Rappo Indonesia.

Pemilihan rumah produksi dan pelatihan Rappo Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya yang kuat dengan topik kewirausahaan sosial. Rappo Indonesia, sebagai sebuah usaha sosial, secara aktif menerapkan praktik kewirausahaan sosial dalam setiap strategi pengembangan organisasinya. Dengan melakukan penelitian pada lokasi tersebut memberikan penulis kesempatan untuk mengamati dan berinteraksi secara langsung praktik kewirausahaan sosial yang ada di Rappo Indonesia diimplementasikan dalam operasional sehari-hari.

Rappo Impact Centre di Depok merupakan salah satu rumah produksi dan pelatihan yang merupakan bentuk replikasi dari Rappo Impact Centre di Makassar. Penelitian secara langsung dilakukan penulis di Rappo Impact Centre Depok karena kemudahan akses penulis dalam mendapatkan akses langsung ke data primer melalui wawancara mendalam dan *forum group discussion* (FGD). Ketersediaan rumah produksi dan pelatihan di Depok ini juga memfasilitasi penggalian informasi mengenai dampak program yang dirasakan oleh komunitas lokal.

Waktu penelitian dilakukan dalam periode dari Oktober 2024 hingga Juni 2025 untuk mengetahui fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Rentang waktu ini memberikan kesempatan penulis untuk mengamati praktik kewirausahaan sosial dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh Rappo Indonesia sebagai usaha sosial melalui pengamatan dan wawancara secara luring maupun daring.

1.8.4 Peran Penulis

Peran penulis dalam penelitian ini menjadi instrumen kunci dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, yaitu sebagai pelaku dari penelitian. Penulis secara langsung melakukan studi dokumen, mengobservasi, dan mewawancarai subjek penelitian.[45] Penulis berupaya mencari informasi mengenai strategi pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh Rappo Indonesia dalam praktik kewirausahaan sosial. Penulis mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Rappo Indonesia melalui media sosial maupun menggali lebih dalam melalui wawancara dengan informan kunci. Melakukan wawancara dengan informan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap untuk pemahaman yang komprehensif. Penulis pun berusaha untuk mempelajari pemaknaan yang dimiliki informan utama mengenai topik penelitian dan menginterpretasikan pemaknaan tersebut secara mendalam.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi secara langsung dan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui pengumpulan dokumentasi yang relevan dan mengamati melalui media sosial untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

[45] J. W. Creswell, op. cit., 267-272.

Dengan demikian, penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi penelitian yang mendalam.

Pertama, penulis menggunakan teknik observasi dengan berada di Rappo Impact Centre Depok selama 2 hari yang tidak berturut. Observasi dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 dan 9 Mei 2023, dimulai dari jam 10.00 hingga 16.00 WIB. Penulis secara aktif mengamati operasional lingkungan kerja dan berinteraksi dengan para karyawan di dalam Rappo Impact Centre Depok untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik kewirausahaan sosial. Observasi dilakukan secara tidak terstruktur, di mana penulis mencatat hal-hal yang dianggap relevan dengan penelitian.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara terstruktur dan *forum group discussion* (FGD) dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan pada tanggal yang sama dengan observasi, yaitu 6 Mei 2025 (wawancara dengan AN dan AL) dan pada 9 Mei 2025 (wawancara dengan penjahit dan penerima manfaat, yaitu IV, YN, LL, LN). Wawancara juga dilakukan dengan AI melalui Google Meet pada 7 Mei 2025. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan melakukan FGD bersama penjahit dan penerima manfaat, yaitu IV, YN, LL, dan LN. Penulis juga melakukan wawancara lanjutan dengan *officer* administrasi dan program melalui Google Meet, yakni TE & NK.

Setiap wawancara ini direkam dan kemudian ditranskripsi untuk dianalisis lebih lanjut. Selain teknik observasi dan wawancara, penulis juga

melakukan studi pustaka yang melibatkan pembacaan artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber terkait lainnya. Penulis membaca berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti studi sebelumnya tentang konsep *social enterprise*, kewirausahaan sosial, model bisnis, proses, peran, dan tantangannya. Selain itu, penulis juga membaca dokumen company profile dan katalog untuk memperoleh informasi tentang profil rappo dan kinerja Rappo. Terakhir, penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan bukti mengenai aktivitas dan kegiatan operasional di Rappo Indonesia. Dokumentasi ini memberikan data penting untuk memahami situasi pedagang kaki lima dan mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Teknik-teknik tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan penulisan temuan. Teknik analisis data dalam pendekatan studi kasus berusaha mendeskripsikan latar atau individu, yang diikuti dengan analisis data untuk menginterpretasikan data temuan.[46]

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 243–245.

1.8.7 Triangulasi Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data untuk melakukan validasi pada data temuan yang telah diperoleh. Triangulasi data merupakan metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber dan sudut pandang yang berbeda untuk melakukan validasi pada data-data temuan penelitian.[47] Penulis menggunakan triangulasi sumber data dengan melakukan pengumpulan data dikumpulkan dari beberapa sumber yang berbeda, termasuk wawancara dengan informan utama yang terdiri dari pendiri, karyawan, dan penerima manfaat, observasi di Rappo Impact Centre Depok, serta studi pustaka dan dokumentasi.

Penggunaan berbagai sumber data ini memungkinkan penulis untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan informasi yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dari sumber yang berbeda kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk melihat kesamaan atau perbedaan dalam temuan-temuan penelitian. Penggunaan triangulasi data dengan melibatkan subjek yang beragam dan sumber informasi yang berbeda memperkuat kepercayaan bahwa hasil penelitian ini merupakan representasi dari fenomena yang diselidiki.

[47] Sugiyono, op. cit., 241-242.

1.8.8 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah subjektivitas yang dirasakan oleh penulis terhadap subjek penelitian, yakni pada usaha sosial yang penulis teliti. Penelitian ini sangat bergantung pada kualitas interpretasi penulis terhadap informasi dan makna yang terkandung dalam hasil wawancara. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan terjadinya bias. Untuk mengurangi bias tersebut, solusi yang diusulkan adalah dengan menerapkan triangulasi data. Selain itu, keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses penulis dalam melakukan observasi secara langsung di kantor pusat Rappo Indonesia dan rumah produksi Rappo Impact Centre Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus pada manfaat yang dirasakan oleh mitra jahit atau penerima manfaat yang berlokasi di Kota Depok.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas topik penelitian dengan latar belakang masalah yang dihadapi. Penjelasan mengenai permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian juga diuraikan pada pendahuluan. Tinjauan penelitian sejenis disampaikan untuk memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti dalam skripsi ini. Metodologi penelitian,

termasuk metode penelitian dan pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran penulis, serta teknik pengumpulan dan analisis data, juga dijelaskan secara mendalam.

Bab II membahas mengenai gambaran umum dan faktor-faktor anteseden yang mendorong proses terbentuknya praktik kewirausahaan sosial di Rappo Indonesia. Pertama, membahas mengenai profil Rappo Indonesia sebagai sebuah usaha sosial mulai dari lokasi usaha, visi misi, dan nilai yang dianut, filosofi logo, serta struktur organisasinya. Selanjutnya, menguraikan faktor anteseden dalam proses berdirinya usaha sosial Rappo yang terdiri dari motivasi atau misi sosial, identifikasi peluang, akses permodalan dan pembiayaan serta dukungan eksternal yang didapatkan saat awal berdirinya Rappo. Selain itu, produk dan layanan yang Rappo jalankan sebagai aktivitas bisnis sosialnya turut dibahas pada bab ini.

Bab III membahas temuan penelitian mengenai manifestasi elemen-elemen kewirausahaan sosial yang dijalankan dari praktik bisnis daur ulang sampah plastik di Rappo Indonesia. Penjabaran diawali dengan perwujudan misi sosial sebagai landasan utama arah gerak organisasi, diikuti oleh inovasi sosial yang diintegrasikan dalam rantai operasional. Selanjutnya, dibahas aspek keberlanjutan finansial melalui model pendapatan dan dukungan hibah yang menopang aktivitas ekonomi Rappo. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan pra-sejahtera, juga menjadi perhatian penting dalam menciptakan proses yang inklusif dan adil. Terakhir, uraian ini ditutup dengan analisis tantangan dan kompleksitas dalam pengelolaan bisnis sosial di tengah dinamika pemberdayaan dan persaingan.

Bab IV membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Rappo Indonesia dalam menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan. Penjabaran dalam bab ini menunjukkan bagaimana pendekatan strategis yang diterapkan tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui peningkatan kapasitas individu, kesadaran lingkungan, dan partisipasi inklusif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menjawab tantangan pembangunan melalui kewirausahaan sosial yang melibatkan penerima manfaat sebagai aktor aktif. Selain itu, model ini memberikan gambaran konkret tentang kontribusi usaha sosial terhadap pembangunan komunitas dan pencapaian SDGs.

Bab V atau penutup membahas kesimpulan secara rinci dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Temuan utama disajikan dan dianalisis berdasarkan data yang telah terkumpul. Tak hanya itu, saran-saran konstruktif diajukan sebagai kontribusi untuk pengembangan pengetahuan dan praktek di bidang yang diteliti.